



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PROSES ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMPN 18 BENGKULU TENGAH

Tentri Hages Tina, Drs. Zulyan, M.Si

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Alamat : jl. Bali Kota Bengkulu 38119

Email : tentrilalisa@gmail.com

Abstrak

Implementasi Kebijakan Dalam Proses Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMPN 18 Bengkulu Tengah. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dosen Pembimbing: Drs, Zulyan, M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan sistem zonasi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru jenjang SMPN 18 Bengkulu Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini diperoleh melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Sistem zonasi adalah sistem rekrutmen peserta didik dengan penentuan skala radius/ zona yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing, dan sekolah diwajibkan menerima calon peserta didik baru yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya penerapan kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMPN 18 Bengkulu Tengah ini Ada beberapa masalah yang timbul akibat adanya kebijakan sistem zonasi baik itu pada siswa, orang tua, guru, dan juga masyarakat. Keinginan untuk menimba pengetahuan di sekolah favorit menjadi luntur dan terpaksa harus menerima kenyataan masuk sekolah non-favorit. Mutu pendidikan yang rendah dan fasilitas sarana penunjang pembelajaran yang kurang memadai di sekolah non-favorit menjadi alasan sepiunya minat siswa untuk menimba pengetahuan di sekolah tersebut. Dampak sistem zonasi Secara keseluruhan, kebijakan zonasi membawa dampak yang kompleks dan beragam bagi guru. Diperlukan dukungan yang konsisten dari pihak sekolah, pemerintah, dan komunitas untuk memastikan bahwa dampak positif dapat dimaksimalkan dan dampak negatif dapat diminimalkan.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan zonasi, penerimaan peserta didik

Abstract

Policy Implementation in the Zoning Process for Accepting New Students at SMPN 18 Central Bengkulu. Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of Bengkulu. Supervisor: Drs, Zulyan, M.Si. This research aims to describe the implementation of the zoning system policy and the obstacles faced in implementing the zoning system policy for accepting new students at SMPN 18 Central Bengkulu level. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. This research was obtained through

observation, interviews and documentation. The zoning system is a student recruitment system with a radius/zone scale determined by each regional government, and schools are required to accept prospective new students who live in the nearest zone radius with a certain percentage of the total number of students to be accepted. The results of the research show that in implementing the zoning policy in accepting new students at SMPN 18 Central Bengkulu, there are several problems that arise as a result of the zoning system policy for students, parents, teachers and also the community. The desire to gain knowledge at your favorite school fades and you are forced to accept the reality of entering a non-favorite school. The low quality of education and inadequate learning support facilities in non-favorite schools are the reasons for students' lack of interest in gaining knowledge at these schools. Impact of the zoning system Overall, zoning policies have complex and varied impacts on teachers. Consistent support from schools, government and communities is needed to ensure that positive impacts can be maximized and negative impacts can be minimized.

Keywords: Implementation of zoning policies, student acceptance

1. PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur secara sistematis dan terencana. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan pendidikan. Namun dalam kenyataannya, di Indonesia masih mengalami permasalahan dalam pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan.

Permasalahan yang lain mengenai kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang masih kurang. Masih banyak dijumpai di beberapa daerah, banyak guru memiliki kemampuan yang masih kurang atau kurang bermutu. Sebagai contoh, masih banyak guru yang menggunakan cara mengajar yang kurang baik, cara mengajar yang membosankan di kelas. Permasalahan demikianlah yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia.

Pada implementasi pemerataan pendidikan kita bisa melihat sekolah yang ada di kota-kota besar sarana dan prasarana pendidikan sudah sangat maju, sedangkan yang di desa-desa atau tempat terpencil masih banyak ditemukan fasilitas dengan menggunakan sarana dan prasarana yang seadanya atau bahkan kurangnya tenaga pengajar. Padahal sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam menunjang terjadinya proses pembelajaran di sekolah, dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang baik dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

Upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan salah satunya adalah mengeluarkan kebijakan baru dalam penerimaan peserta didik baru melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang di dalamnya mengatur mengenai sistem zonasi (Desi Wulandari dkk, 2018:3).

Sistem zonasi pada PPDB merupakan kebijakan yang telah berjalan sejak tahun 2017, yang dimaksudkan untuk pemerataan kualitas pendidikan yang diharapkan dapat menghilangkan istilah Sekolah Favorit atau Sekolah Unggulan (Wahyuni, 2018:14). Akhirnya, mutu setiap sekolah bisa terlihat karena selama ini sekolah favorit selalu menghasilkan peserta didik yang berprestasi sebab Penerimaan Peserta Didik Baru berupa seleksi yang ketat sehingga hanya peserta didik yang berprestasi saja yang diterima. Dengan adanya sistem zonasi sekolah yang bukan favorit juga berpeluang menunjukkan bisa seperti sekolah unggulan secara mutu dan kualitas karena dana BOS yang didapat sama, maka peluang baiknya juga sama.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerapkan sistem zonasi. Sekolah wajib menerima calon peserta didik baru yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang paling lambat diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerah tersebut dengan memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.

Pada tahun 2021 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia kembali mengeluarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat yang merupakan revisi Undang-Undang No 14 Tahun 2018. meskipun masih banyak pro dan kontra, Permendikbud masih memberlakukan sistem zonasi (PPDB) di tahun 2021.

Kementerian pendidikan dan budaya menyebutkan zonasi menjadi kriteria utama dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat Sekolah Menengah Atas atau SMA sederajat. Zonasi atau jarak sekolah menjadi pertimbangan calon siswa untuk diterima. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) saat ini berdasarkan sistem zonasi, dalam upaya memperbaiki sistem pendidikan agar proses pembelajaran berlangsung

efektif dan efisien mungkin. Untuk itu kriteria kelulusan calon peserta didik baru berdasarkan zonasi bukan lagi hasil ujian nasional.

Berdasarkan hasil observasi sementara yang dilakukan penulis di SMPN 18 Bengkulu Tengah menemukan fakta bahwa SMPN 18 Bengkulu Tengah telah menerapkan kebijakan sistem zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru hal ini di laksanakan dengan bertujuan Untuk mengatasi permasalahan kualitas Pendidikan, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan sistem zonasi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru jenjang SMPN 18 Bengkulu Tengah.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian adalah SMPN 18 Bengkulu Tengah. Subjek Penelitian ini adalah kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, serta peserta didik yang menjadi objek dari implementasi kebijakan sistem zonasi tersebut. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Sedangkan tahapan analisis data menggunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan beberapa penemuan mengenai implementasi kebijakan dalam proses zonasi penerimaan peserta didik baru di SMPN 18 Bengkulu Tengah. Berikut diskripsi hasl penelitian mengenai implementasi kebijakan dalam proses zonasi penerimaan peserta didik baru di SMPN 18 Bengkulu Tengah. Kebijakan zonasi adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mengatur atau mengelola wilayah tertentu menjadi zona-zona tertentu berdasarkan karakteristik, kebutuhan, atau tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan zonasi adalah untuk mengatur penggunaan lahan, pengembangan wilayah, atau distribusi sumber daya secara lebih teratur dan efisien.

Beberapa faktor yang mempengaruhi diterimanya peserta didik di suatu sekolah salah satunya adalah **Zonasi** dalam beberapa kasus, sekolah menerapkan kebijakan zonasi di mana siswa yang tinggal di sekitar domisili sekolah memiliki prioritas penerimaan. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penerimaan siswa di zona tertentu mungkin tidak selalu dijamin jika jumlah pendaftar melebihi kapasitas sekolah. **Kapasitas Sekolah** ,Sekolah biasanya memiliki kapasitas terbatas untuk menerima siswa baru. Oleh karena itu, jika jumlah pendaftar melebihi kapasitas sekolah, sekolah mungkin harus melakukan seleksi dan hanya menerima siswa yang memenuhi kriteria tertentu atau menggunakan sistem lotere. Sekolah biasanya memiliki kriteria tertentu yang digunakan dalam mengevaluasi pendaftar. Kriteria ini bisa beragam, termasuk prestasi akademik, hasil tes standar, wawancara, partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, atau kriteria lainnya yang dianggap relevan oleh sekolah.

setiap calon peserta didik yang ingin mendaftarkan diri di SMPN 18 Bengkulu Tengah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. sesuai dengan kebijakan zonasi bahwa setiap anak yang tinggal di sekitar sekolah atau berjarak antara sekolah dan rumah 1 Km berhak mendapatkan pendidikan yang layak di sekolah tersebut, namun tak hanya itu calon peserta didik juga harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan pihak sekolah.

Jalur zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, bukan berdasarkan Nilai Ujian Nasional sebagaimana ketentuan sebelumnya. Jalur zonasi juga merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas, serta melayani kelompok yang rentan dan terpinggirkan.

Sistem zonasi adalah sistem rekrutmen peserta didik dengan penentuan skala radius/ zona yang di tetapkan oleh pemerintah daerah masing- masing, dan sekolah diwajibkan menerima calon peserta didik baru yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima.

Hasil wawancara dengan kepala sekolah SMPN 18 Bengkulu Tengah yaitu mengemukakan bahwa kebijakan zonasi ini merupakan suatu kebijakan yang penting dalam pemerataan Pendidikan di Indonesia . Dengan adanya sekolah sistem zonasi berarti lokasi sekolah tersebut lebih dekat dengan rumah atau tempat tinggal siswa

sehingga dapat membantu meminimalisir beban biaya transportasi yang digunakan menuju sekolah. Untuk menciptakan banyak sekolah favorit dengan adanya program interfensi dalam peningkatan pendidikan yang diharapkan seluruh zonasi kelak menjadi pembentuk bibit unggul yang mampu menjadikan sekolah yang berkualitas.

Penting untuk memastikan bahwa seluruh proses ini dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Selain itu, komunikasi yang baik antara pemerintah, sekolah, dan orang tua juga merupakan kunci untuk menjaga kelancaran proses ini. Penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi menggunakan jarak sebagai syarat utama, bukan lagi seleksi berdasarkan kemampuan. Zonasi pendidikan dapat dilihat dari sisi sosial ekonomi, memberikan kesempatan kepada siswa dari kelas sosial ekonomi rendah untuk masuk ke sekolah yang memiliki peserta didik dari sosial ekonomi campuran dapat meningkatkan prestasi akademik mereka.

Dari hasil wawanvara yang saya lakukan dapat diketahui bahwa Kebijakan zonasi dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia, bertujuan untuk mendistribusikan siswa secara merata ke berbagai sekolah berdasarkan wilayah tempat tinggal mereka. Meskipun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan antar sekolah, ada beberapa dampak yang dirasakan oleh guru dalam mengajar, antara lain:

1. Keberagaman Tingkat Kemampuan Siswa:

- a. Dampak Positif: Guru dapat mengajarkan siswa dengan beragam kemampuan akademis dan sosial, yang memperkaya pengalaman mengajar dan mengembangkan kemampuan guru dalam menangani berbagai tingkat kemampuan.
- b. Dampak Negatif: Guru mungkin menghadapi tantangan lebih besar dalam menyusun strategi pembelajaran yang efektif untuk siswa dengan rentang kemampuan yang lebih luas.

2. Peningkatan Tantangan dalam Manajemen Kelas:

- a. Dampak Positif: Guru dapat mengembangkan keterampilan manajemen kelas yang lebih baik dengan menghadapi berbagai karakter siswa.
- b. Dampak Negatif: Guru mungkin mengalami kesulitan dalam menjaga disiplin dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif jika terdapat banyak siswa dengan latar belakang yang sangat beragam.

3. Perubahan dalam Metode Pengajaran:

- a. Dampak Positif: Guru terdorong untuk mengembangkan dan mengadopsi metode pengajaran yang lebih inklusif dan kreatif untuk memenuhi kebutuhan semua siswa.
- b. Dampak Negatif: Proses penyesuaian metode pengajaran bisa memakan waktu dan menambah beban kerja guru, terutama jika sumber daya dan pelatihan yang memadai tidak tersedia.

4. Interaksi dengan Orang Tua dan Komunitas:

- a. Dampak Positif: Guru memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan orang tua dan komunitas yang lebih beragam, yang dapat memperkaya pemahaman mereka tentang kondisi sosial-ekonomi siswa.
- b. Dampak Negatif: Guru mungkin menghadapi tantangan dalam menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orang tua dari latar belakang yang berbeda-beda, terutama jika ada perbedaan budaya atau bahasa.

5. Pengembangan Profesional:

- a. Dampak Positif: Kebijakan zonasi bisa mendorong guru untuk terus mengembangkan diri dan beradaptasi dengan perubahan dinamika kelas, yang pada akhirnya meningkatkan profesionalisme mereka.
- b. Dampak Negatif: Tekanan untuk memenuhi kebutuhan semua siswa dengan latar belakang yang beragam dapat meningkatkan tingkat stres dan kelelahan pada guru.

6. Distribusi Sumber Daya:

- a. **Dampak Positif:** Sekolah dengan kondisi sebelumnya kurang memadai dapat menerima lebih banyak perhatian dan sumber daya dari pemerintah, sehingga mendukung proses belajar mengajar yang lebih baik.
- b. **Dampak Negatif:** Guru di sekolah yang sebelumnya sudah baik mungkin merasa sumber daya menjadi terbatas karena harus dibagi lebih merata dengan sekolah lain.

Secara keseluruhan, kebijakan zonasi membawa dampak yang kompleks dan beragam bagi guru. Diperlukan dukungan yang konsisten dari pihak sekolah, pemerintah, dan komunitas untuk memastikan bahwa dampak positif dapat dimaksimalkan dan dampak negatif dapat diminimalkan.

4. PENUTUP

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PROSES ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMPN 18 BENGKULU TENGAH** sebagai berikut:

Pertama, kebijakan zonasi adalah pendekatan dalam pengaturan penempatan peserta didik ke sekolah-sekolah berdasarkan wilayah geografis tertentu. Dalam sistem ini, wilayah tertentu ditetapkan sebagai zona/zonasi, dan peserta didik yang tinggal di dalam zona tersebut diberikan prioritas untuk masuk ke sekolah-sekolah yang berada di wilayah tersebut. kebijakan zonasi juga dapat memperkaya diskusi kelas, memungkinkan pertukaran ide dan pengalaman yang lebih luas, serta meningkatkan pemahaman siswa tentang beragam perspektif.

Kedua, faktor penghambat dalam implementasi kebijakan zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru yaitu Pemetaan zona/wilayah yang ditetapkan pemda belum akurat dan rinci, kuota yang ditetapkan pemda belum sesuai dengan kebutuhan serta masih adanya sekolah yang melanggar ketentuan dalam kebijakan sistem zonasi terkait PPDB ini yang dikarnakan belum adanya regulasi yang tegas. Kemudian Masih minim sosialisasi kepada masyarakat serta motivasi dari hasil belajar siswa terjadi

penurunan. Adapun yang khawatir orang tua siswa terhadap adanya sistem kebijakan zonasi ini diantaranya, salah satu kekhawatiran utama orang tua adalah tentang kualitas pendidikan yang akan diterima anak-anak mereka di sekolah yang terletak dalam zona tempat tinggal mereka. Mereka mungkin khawatir bahwa sekolah tersebut mungkin tidak menyediakan standar pendidikan yang memadai atau bahwa kualitas pengajaran dan fasilitas pendukung mungkin kurang memuaskan

Ketiga, Adapun dampak yang dirasakan peserta didik terhadap sistem kebijakan zonasi ini yaitu :

- 1) Peserta didik merasa terbatas dalam pilihan sekolah yang mereka miliki karena terikat pada zona tertentu.
- 2) Peserta didik merasa cemas atau khawatir tentang apakah mereka akan diterima di sekolah yang mereka inginkan melalui sistem zonasi.
- 3) Meskipun terbatas pada pilihan sekolah dalam zona tertentu, peserta didik mengalami beragam pengalaman belajar tergantung pada kualitas pendidikan, fasilitas, dan budaya sekolah di masing-masing zona.
- 4) Peserta didik dapat mengalami pertumbuhan sosial dan budaya yang beragam karena terpapar pada lingkungan sekolah yang lebih beragam secara sosial dan ekonomi jika sekolah tersebut menerima siswa dari zona yang berbeda.
- 5) Melalui pengalaman mereka dalam sistem kebijakan zonasi, peserta didik mengembangkan pemahaman tentang pentingnya akses pendidikan yang merata dan implikasi dari pembatasan pilihan sekolah berdasarkan zona tempat tinggal.
- 6) Peserta didik merasa lebih terikat dengan komunitas sekolah yang terletak dalam zona tempat tinggal mereka karena mereka berbagi pengalaman dan identitas dengan teman sekelas dan lingkungan sekitar mereka.

5. UCAPAN TERIMA KASIH (*Optional*)

Dalam penyelesaian studi dan penulisan proposal ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- 1 Bapak Drs. Zulyan, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukkan beliau , memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan proposal ini.
- 2 Bapak Elfahmi Lubis, SH.,S.Pd.,M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
- 3 Bapak dan Ibu dosen FKIP Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
- 4 Kedua orang tua yang paling berjasa dalam hidup saya , Bapak Hasan dan Ibu Sukma Orang yang hebat yang selalu menjadi Penyemangat saya, dan sebagai sandaran terkuat saya dari kerasnya dunia, yang selalu memberikan dukungan secara moril, materil serta doa yang senantiasa mengantarkan penulis hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
- 5 Kepada kedua saudara tercintaku Genny Anggriani dan Fessy Martina, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi hingga bisa ketahap saat ini.
- 6 Kepada saudara Cevin Okta Saputra yang telah membantu disetiap kesulitan dan memberikan semangat kepada penulis selama proses penyelesaian studi

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ag. Subarsono. 2006. Analisis Kebijakan Publik. Hlm 17 Andy Agustin Syakarofath Ahmad Sulaiman Muhamad Faqih Irsyad, Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia, [Http://Jurnaldikbud.Kemdikbud.Go.Id](http://Jurnaldikbud.Kemdikbud.Go.Id).
- Aris Nurlailiyah, “Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa Smp Di Yogyakarta,” *Realita* 17, No. 1 (2019): 13–22.
- Asri Ulfah Wulan Sari¹ , Ali Imron² , Ahmad Yusuf Sobri³, Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online, 267023823.Pdf (Core.Ac.Uk)
- Dian Purwanti¹, Ira Irawati², Jossy Adiwisastro³, Herijanto Bekt⁴, Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Kota Bandung, *Artkel Skripsi* 2.

Elsa Nida Pangaribuan, Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Smp Di Kabupaten Gresik, Artikel Skripsi 1.

Hasbullah, Syaiful Anam, Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (Smpn) Di Kabupaten Pamekasan, 235210164.Pdf (Core.Ac.Uk).

Ira Madiana¹, Bagdawansyah Alqadri¹, Lalu Sumardi¹, Mohamad Mustari¹, Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Serta Dampaknya Terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan, Artikel Skripsi 4.

Ira Madiana¹, Bagdawansyah Alqadri¹, Lalu Sumardi¹, Mohamad Mustari¹, Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Serta Dampaknya Terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan, Artikel Skripsi 4.

Risna¹, Lisdahlia², Syamsul Edi, Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan Rtikel Skripsi 5.

Muhammad Jamil¹, Suswati Hendriani², Devy Aisyah³, Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Di Smpn Kabupaten Tanah Datar

I Kadek Dede Junaedy*, I Made Mardika, Dan I Made Yudhiantara, Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Di Sekolah Menengah Pertama Negeri (Smpn) 1 Abiansemal

Indra Budi Setiawan¹, Husaini Usman², Pola Implementasi Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru

Riski Tri Widyastuti, Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik

Pustaka yang berupa judul buku:

H.A.R Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan, Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003, h.3